

**ANALISIS HUKUM INTEGRITAS KPPS (KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA) DALAM
PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILU 2024
(STUDI KASUS : KECAMATAN PERCUT SEI TUAN TPS 60, DESA KOLAM)**

**Parlaungan Gabriel Siahaan¹, Novridah Reanti Purba², Sherly Feliza Koto³, Irmawati Purba⁴,
Ummu Hany Lubis⁵, Rita Amilia⁶, Torang Jhon Raido Tambunan⁷**

parlaungansiahaan@unimed.ac.id¹, novridapurba1@gmail.com², sherlyfeliza900@gmail.com³,
irmawatipurba24@gmail.com⁴, hanyummu140@gmail.com⁵, ritaamilia2004@gmail.com⁶,
torangj.rambunan140404@gmail.com⁷

Universitas Negeri Medan

Abstrak: Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Masyarakat Indonesia dalam menentukan wakil-wakil rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Pemilu merupakan kedaulatan rakyat dimana rakyat berhak mengeluarkan suaranya untuk menentukan pemimpin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui integrasi kpps sebagai penyelenggara pemilihan umum di tahun 2024, untuk mengetahui pengawasan kpps dalam pemilihan umum saat penghitungan suara, untuk mengetahui penegakan hukum terkait integrasi hukum kpps. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang merupakan cara penelitian untuk mendapatkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan orang-orang, serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian yang dilakukan di Kantor kepala desa kolam yang terletak di Jalan utama 1, Kecamatan percut sei tuan, Kota deli serdang, Sumatera Utara, yang dilakukan dengan 1 (satu) orang ketua dan 6 (enam) anggota kpps ,tps 60 terkait dengan Hukum Integritas KPPS Dalam Penghitungan Suara pada Pemilu 2024 menghasilkan kesimpulan bahwa setiap anggota KPPS pahan integrasi yang dilakukan pada pemilu. Setiap anggota melaukan tugas dan tanggung jawab berdasarkan hukum yang berlaku serta partisipasi mereka dalam penghitungan suara dapat dinilai baik sehingga berlangsungnya pemilu di tps 06 berjalan dengan lancar tanpa adanya keributan ataupun adanya aksi curang.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Integritas, KPPS.

***Abstract:** General elections (Pemilu) are one of the methods used by the Indonesian people to determine the people's representatives in running the government. Elections constitute popular sovereignty where the people have the right to cast their votes to determine the leader. The aim of this research is to find out the integration of the KPPS as organizers of the general election in 2024, to find out the supervision of the KPPS in the general election when counting votes, to find out law enforcement regarding the legal integration of the KPPS. This research uses qualitative methods, which is a research method to obtain descriptive data from people's written or spoken words, as well as observable behavior. Research conducted at the office of the head of Kolam Village located on Jalan Utama 1, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang City, North Sumatra, which was carried out with 1 (one) chairman and 6 (six) members of the KPPS, TPS 60 related to the Integrity Law KPPS's vote counting in the 2024 elections resulted in the conclusion that every KPPS member understood the integration carried out in the elections. Each member carries out their duties and responsibilities based on applicable law and their participation in vote counting can be assessed well so that the election at polling station 06 runs smoothly without any commotion or fraudulent activity.*

Keywords: General Election, Integrity, KPPS.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Masyarakat Indonesia dalam menentukan wakil-wakil rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Pemilu merupakan kedaulatan rakyat dimana rakyat berhak mengeluarkan suaranya untuk menentukan pemimpin. Pada amandemen terakhir UUD 1945, bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Menurut Undang-Undang No 7 tahun 2017 mengartikan pemilu sebagai ”Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Integrasi dalam pemilu meliputi janji dan komitmen melaksanakan semua tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Maka, pakta integritas dalam Pemilu 2024 adalah dokumen perjanjian yang merupakan bentuk persetujuan atau kesepakatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024. Pakta integritas ini wajib bagi badan ad hoc penyelenggara seperti PPK, PPS, KPSS dan Pantarlih Pemilu 2024. Ada beberapa isi contoh integritas dalam pemilihan yaitu:

1. Menyelenggarakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan Umum dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan Umum, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsiialitas nonpartisan dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan Umum yang jujur dan adil bagi peserta Pemilu, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
10. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Pemerintahan yang demokratis terwujud melalui peran serta dan partisipasi seluruh rakyat Indonesia (Khairi, 2017). Salah satu bentuk partisipasi rakyat dalam negara demokrasi adalah dengan menggunakan hak politiknya, yakni melalui penyelenggaraan pemilu yang demokratis, integritas, dan profesional. Penyelenggaraan pemilu dimaksud adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di pemerintahan demi terwujudnya pemilu yang demokratis sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 2 UU 7/2017. Hal ini juga sudah secara tegas diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, sehingga

lembaga penyelenggara pemilu, hadir yang merupakan perintah konstitusi, harus dapat menyelenggarakan pemilu demokratis yang berkualitas. Oleh karena itu dibutuhkan aturan perundang-undangan yang tepat dan sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia dan perkembangan peradaban manusia (*das sein*) guna menyelenggarakan pemilu yang berintegritas. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis dilaksanakan dengan asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Selain itu, profesionalitas penyelenggara pemilu juga sangat diharapkan untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Jumaeli, 2021). Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang merupakan cara penelitian untuk mendapatkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan orang-orang, serta perilaku yang dapat diamati, sesuai dengan penjelasan Bogdan dan Tylor (sebagaimana disebut dalam Moleong, 2011).

Penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif karena pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan keadaan atau kejadian di lapangan berdasarkan data yang telah terkumpul dan di jadikan satu yang di sajikan dalam bentuk kata kata atau kalimat yang sudah tersusun dan juga metode ini sesuai dengan tujuan dari judul yang kami angkat yaitu untuk menganalisis hasil suara pada pemilu tahun 2024 apa saja yang menjadi proses pembuktian dalam kasus hasil suara politik yang merujuk pada studi kasus. Setelah kami mendapatkan data yang telah terkumpul kemudian kami pisah pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, kemudian kami kembangkan menjadi permasalahan permasalahan beserta pemecahannya yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran dari hasil beberapa kesimpulan yang kami simpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hal-hal yang terkait dengan penelitian ini, teori-teori yang mendukung penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian, dalam bab ini akan dijelaskan hasil dari penelitian. Pembahasan pada bab ini didapat melalui hasil pengumpulan data melalui studi wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap informan-informan yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini akan menguraikan hal-hal mengenai hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2024 yang berlokasi di Kantor kepala desa kolam yang terletak di Jalan utama 1, Kecamatan percut sei tuan, Kota deli serdang, Sumatera Utara, yang dilakukan dengan 1 (satu) orang ketua dan 6 (enam) anggota kpps ,tps 60 terkait dengan Hukum Integritas KPPS Dalam Penghitungan Suara pada Pemilu 2024.

Analisis ini berfokus pada Hukum Integritas KPPS Dalam Penghitungan Suara pada Pemilu 2024 yang data-data nya akan dijabarkan secara langsung oleh informan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah peneliti siapkan sebelumnya. Observasi yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan akan memperoleh hasil yang lebih valid dan maksimal karena data serta proses yang terjadi di lapangan lebih relevan.

Hasil penelitian di analisis oleh peneliti dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang artinya peneliti akan menggambarkan, menguraikan serta menginterpretasikan seluruh data yang terkumpul sehingga menjadi satu gambaran yang umum dan menyeluruh.

Pada tahap selanjutnya, peneliti membuat poin-poin pertanyaan yang menjadi acuan saat melakukan wawancara kepada informan, lalu mengumpulkan data-data yang didapatkan sewaktu di

lapangan, dan kemudian peneliti melakukan analisis berdasarkan data-data yang didapat di lapangan. Untuk dapat menjawab permasalahan dari Hukum Integritas KPPS Dalam Penghitungan Suara pada Pemilu 2024 peneliti menggunakan tahapan-tahapan berikut pada saat terjun ke lapangan, yaitu:

1. Pertama, menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan sewaktu wawancara.
2. Kedua, mengurus surat pengantar perizinan penelitian agar mendapatkan izin dalam melakukan penelitian serta setelahnya melakukan pendekatan dengan para narasumber.
3. Ketiga, melakukan wawancara dengan para narasumber yang terkait, dan peneliti mendapatkan hasil wawancara yang memenuhi kebutuhan dalam penelitian ini.
4. Keempat, melakukan dokumentasi.

Analisis Hasil Penelitian

Setelah melakukan wawancara terhadap informan dan mengobservasi langsung ke lapangan, peneliti dapat menganalisis data terkait Hukum Integritas KPPS Dalam Penghitungan Suara pada Pemilu 2024.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada narasumber mengenai Hukum Integritas KPPS Dalam Penghitungan Suara pada Pemilu 2024 diperoleh data sebagai berikut.

1. Hukum integritas
 1. Pada kategori sub bab ini berisikan pemahaman keenam narasumber mengenai hukum integritas. keenam narasumber memahami bahwa hukum integritas adalah tindakan pemberian uang kepada orang banyak untuk kepentingan tertentu.
 2. KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)
 3. Pada kategori sub bab ini ditemukan dari hasil wawancara bahwa narasumber 2,3,4,5 dan 6 merincikan bagaimana penanggung jawab sebagai penyelenggara pemilihan umum di tahun 2024
 4. Pemilu
 5. Dalam Pemilu juga dianggap sebagai sebuah kedaulatan bagi rakyat dengan melaksanakan pemilu yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dengan menjamin prinsip perwakilan, akuntabilitas dan Pemilu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut ini tanggapan 7 narasumber

Narasumber 1 (ketua kpps)	
Apa motivasi anda masuk dalam keanggotaan kpps ?	“ikut melancarkan pemilu dan menyukseskan acara apalagi saya dari pemerintahan dan sebagai kepala dusun.”
Apa saja tugas kpps yang ada tahu dalam pemilihan?	“mendata btw,siapa siapa aja warga yg masih tinggal di tempat ini dan siapa yg meninggal nah dstu tugas kelala dusun untuk mengetahui hal itu.”
Apakah menurut anda tanggung jawab sebagai anggota kpps itu berat?	“berat,sangat berat karna suksesnya pemilu itu ada di tangan anggota kpps”
Apakah semua anggota kpps disini kompak atau dapat berkerjasama dalam pemilu?	“alhamdulillah kompak dan baik semua itu tergantung dari arahan kpps alhamdulillah kerja sama.”
Apakah komunikasi anggota kpps baik?	“alhamdulillah kami cukup baik dalam berkomunikasi”

Bagaimana integritas kpps sebagai penyelenggara pemilihan umum di tahun 2024?	“integrasinya transparan,jujur ya memilih sesuai dengan hak nya masing masing tanpa ada interpesi.”
Bagaimana pengawasan kpps dalam pemilihan umum saat perhitungan suara ?	“sangat baik karna dstu kan banyak ada panwas,saksi jadi kita bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku yg sudah di amanahkan kepada kami.”
Apakah ada masalah yang terjadi di TPS 60 ini ketika melkukan perhitungan suara? “Misalnya masyarakat tidak terima dengn hasilnya atau adanya ditemukan penggelembungan suara di tps 60 ini.”	“tidak ada,aman aman ada sudah sesuai dengan suara yg ada suara yg masuk dan tidak ada masalah dalam artian sinkron datanya”
Bagaimana penegak hukum terkait integritas hukum kpps?	“baik namun karna punya saya gaada masalah ya saya baik baik aja gaada masalah”
Kesulitan apa saja yang dialami oleh anggota ketika pemilu kemarin?	“sirekap la karna sirekap kemarin yang sangat memakan waktu kami seharusnya selesai pada pukul lebih awal lebih cepat tapj karna masalah sirekao itu yang belum online jadi tertunda jadi bekerja sampe 24 jam seharusnya jam 10 sudah mulangkan ini bahkan sampe jam 7 pagi ke pagi lagi.”

Narasumber 2 (anggota kpps)	
Apa motivasi anda masuk dalam keanggotaan kpps ?	“Untuk menambah pengalaman baru aja dan kita jadi tau tentang proses demokrasi”
Apa saja tugas kpps yang ada tahu dalam pemilihan?	“Yang saya tau si mempersiapkan tempat pemungutan suara terus mengawasi proses pencoblosan agar tidak ada kecurangan lalu menghitung suara dan mendata identitas pemilih”
Apakah menurut anda tanggung jawab sebagai anggota kpps itu berat?	“Berat, karna kita bertanggung jawab atas suara rakyat”

Apakah semua anggota kpps disini kompak atau dapat berkerjasama dalam pemilu?	“Kompak, komunikasi antara anggota – anggota”
Apakah komunikasi anggota kpps baik?	“Juga baik”
Bagaimana integritas kpps sebagai penyelenggara pemilihan umum di tahun 2024?	“Integrasi nya itu memastikan bahwa proses pemilihan ini berjalan lancar dan adil”
Bagaimana pengawasan kpps dalam pemilihan umum saat perhitungan suara ?	“Sangat baik karna banyak yang mengawasi juga”
Apakah ada masalah yang terjadi di TPS 60 ini ketika melkukan perhitungan suara? “Misalnya masyarakat tidak terima dengn hasilnya atau adanya ditemukan penggelembungan suara di tps 60 ini.”	“Tidak ada, semuanya aman terkendali “
Bagaimana penegak hukum terkait integritas hukum kpps?	“Dikenakan sanksi klo melanggar hukum anggota”
Kesulitan apa saja yang dialami oleh anggota ketika pemilu kemarin?	“ Masalah waktu”

Narasumber 3 (anggota kpps)	
Apa motivasi anda masuk dalam keanggotaan kpps ?	“Ikut ikut teman si terus buat nambah pengalaman baru juga “
Apa saja tugas kpps yang ada tahu dalam pemilihan?	“Menerima dan meriksa surat suara terus mengawasi lalu mendata identitas pemilih dan menghitung suara “
Apakah menurut anda tanggung jawab sebagai anggota kpps itu berat?	“Berat, karna tekanan waktu”
Apakah semua anggota kpps disini kompak atau dapat berkerjasama dalam pemilu?	“Lumayan kompak la “
Apakah komunikasi anggota kpps	“Baik”

baik?	
Bagaimana integritas kpps sebagai penyelenggara pemilihan umum di tahun 2024?	“Setiap suara di hitung dengan teliti dan hasilnya di catat dengan akurat “
Bagaimana pengawasan kpps dalam pemilihan umum saat perhitungan suara ?	“Baik”
Apakah ada masalah yang terjadi di TPS 60 ini ketika melakukan perhitungan suara? “Misalnya masyarakat tidak terima dengan hasilnya atau adanya ditemukan penggelembungan suara di tps 60 ini.”	“Tidak ada, aman aman aja si “
Bagaimana penegak hukum terkait integritas hukum kpps?	baik
Kesulitan apa saja yang dialami oleh anggota ketika pemilu kemarin?	Kesulitannya cuma di waktu si karna pas lagi ngitung suara tu ada batasan waktunya

Narasumber 4 (anggota kpps)	
Apa motivasi anda masuk dalam keanggotaan kpps ?	“Ingin berkontribusi sosial dan ingin tau cara pemilihan ini berlangsung “
Apa saja tugas kpps yang ada tahu dalam pemilihan?	“Memverifikasi data pemilih, mengawasi jalannya pemilu lalu menghitung surat suara”
Apakah menurut anda tanggung jawab sebagai anggota kpps itu berat?	“Berat, mungkin karna saya masi baru bergabung jadi anggota kpps, jadi kyak berat gitu “
Apakah semua anggota kpps disini kompak atau dapat berkerjasama dalam pemilu?	“Kompak, kerjasama dengan para anggota juga “
Apakah komunikasi anggota kpps baik?	“ Baik”
Bagaimana integritas kpps sebagai penyelenggara pemilihan umum di tahun 2024?	“Bertanggungjawab untuk memastikan bahwa jumlah suara yang di hitung sesuai apa ga”

Bagaimana pengawasan kpps dalam pemilihan umum saat perhitungan suara ?	“Baik “
Apakah ada masalah yang terjadi di TPS 60 ini ketika melakukan perhitungan suara? “Misalnya masyarakat tidak terima dengan hasilnya atau adanya ditemukan penggelembungan suara di tps 60 ini.”	“Aman aja si “
Bagaimana penegak hukum terkait integritas hukum kpps?	“Penegakan hukumnya apa ya seperti kena sanksi jika melanggar hukum anggota kpps mungkin”
Kesulitan apa saja yang dialami oleh anggota ketika pemilu kemarin?	“Kesulitannya kemaren klo ga salah karna waktu juga”

Narasumber 5 (anggota kpps)	
Apa motivasi anda masuk dalam keanggotaan kpps ?	“ karna banyak anak muda yg baru masuk jadi ada niat hati jugak pengen masuk mencoba hal baru.”
Apa saja tugas kpps yang ada tahu dalam pemilihan?	“ya pastinya mendata orang yg mau nyoblos truss pastinya mengarahkan saat pencoblosan”
Apakah menurut anda tanggung jawab sebagai anggota kpps itu berat?	“menurut saya sangat berat karna saat itu kan menentukan presiden kan ya”
Apakah semua anggota kpps disini kompak atau dapat berkerjasama dalam pemilu?	“alhamdulillah di tps tempat saya ini semua anggotanya kompak dan saling kerja sama. “
Apakah komunikasi anggota kpps baik?	“Baik”
Bagaimana integritas kpps sebagai penyelenggara	“terbuka dan transparan karna kan apalagi ada saksi ya “

pemilihan umum di tahun 2024?	
Bagaimana pengawasan kpps dalam pemilihan umum saat perhitungan suara ?	“pengawasannya cukup baik dan teliti ya yg saya lihat di tmpt saya “
Apakah ada masalah yang terjadi di TPS 60 ini ketika melkukan perhitungan suara? “Misalnya masyarakat tidak terima dengn hasilnya atau adanya ditemukan penggelembungan suara di tps 60 ini.”	“tidak ada karna dsni murni jadi apapun hasilnya masyarakat tidak ada yg ikut campur”
Bagaimana penegak hukum terkait integritas hukum kpps?	“aman aman aja karna di tmpt saya aman “
Kesulitan apa saja yang dialami oleh anggota ketika pemilu kemarin?	“kalo ini pasti si rekap ya karna harus upload online dan yg buat pulang pagi”

Narasumber 5 (anggota kpps)	
Apa motivasi anda masuk dalam keanggotaan kpps ?	“ karna banyak anak muda yg baru masuk jadi ada niat hati jugak pengen masuk mencoba hal baru.”
Apa saja tugas kpps yang ada tahu dalam pemilihan?	“ya pastinya mendata orang yg mau nyoblos truss pastinya mengarahkan saat pencoblosan”
Apakah menurut anda tanggung jawab sebagai anggota kpps itu berat?	“menurut saya sangat berat karna saat itu kan menentukan presiden kan ya”
Apakah semua anggota kpps disini kompak atau dapat berkerjasama dalam pemilu?	“alhamdulillah di tps tempat saya ini semua anggotanya kompak dan saling kerja sama. “
Apakah komunikasi anggota	“Baik”

kpps baik?	
Bagaimana integritas kpps sebagai penyelenggara pemilihan umum di tahun 2024?	“terbuka dan transparan karna kan apalagi ada saksi ya “
Bagaimana pengawasan kpps dalam pemilihan umum saat perhitungan suara ?	“pengawasannya cukup baik dan teliti ya yg saya lihat di tmpt saya “
Apakah ada masalah yang terjadi di TPS 60 ini ketika melkukan perhitungan suara? “Misalnya masyarakat tidak terima dengn hasilnya atau adanya ditemukan penggelembungan suara di tps 60 ini.”	“tidak ada karna dsni murni jadi apapun hasilnya masyarakat tidak ada yg ikut campur”
Bagaimana penegak hukum terkait integritas hukum kpps?	“aman aman aja karna di tmpt saya aman “
Kesulitan apa saja yang dialami oleh anggota ketika pemilu kemarin?	“kalo ini pasti si rekap ya karna harus upload online dan yg buat pulang pagi”

Narasumber 6 (anggota kpps)	
Apa motivasi anda masuk dalam keanggotaan kpps ?	“karna ditawari teruss banyak juga temen yg masuk jadi nya tertarik gitu “
Apa saja tugas kpps yang ada tahu dalam pemilihan?	“ya pastinya mendata orang yg mau nyoblos truss pastinya mengarahkan saat pencoblosan agar gak bingung saat nyoblos “
Apakah menurut anda tanggung jawab sebagai anggota kpps itu berat?	“menurut saya sangat berat karna saat itu kan menentukan presiden kan ya trusss juga ada “
Apakah semua anggota kpps disini kompak atau dapat berkerjasama dalam pemilu?	alhamdulillah di tps tempat saya ini semua anggotanya kompak dan saling kerja sama jadi gak terasa aja gitu waktunya”

Apakah komunikasi anggota kpps baik?	“Baik”
Bagaimana integritas kpps sebagai penyelenggara pemilihan umum di tahun 2024?	“terbuka dan transparan karna kan apalagi ada saksi ya dan gak mungkin jugak kalo melakukan licik”
Bagaimana pengawasan kpps dalam pemilihan umum saat perhitungan suara ?	“pengawasannya cukup baik dan teliti ya yg saya lihat di tmpt saya jadi aman aman aja dan gaada yg curang”
Apakah ada masalah yang terjadi di TPS 60 ini ketika melakukan perhitungan suara? “Misalnya masyarakat tidak terima dengn hasilnya atau adanya ditemukan penggelembungan suara di tps 60 ini.”	“tidak ada karna dsni murni jadi apapun hasilnya masyarakat tidak ada yg ikut campur”
Bagaimana penegak hukum terkait integritas hukum kpps?	“aman aman aja karna di tmpt saya aman jadi menurut saya gaada yg kerjanya tuh menye menye semua lakuin sesuai tugasnya”
Kesulitan apa saja yang dialami oleh anggota ketika pemilu kemarin?	“kalo ini pasti si rekap ya karna harus upload online dan yg buat pulang pagi dan paling lama kerjanya”

Pembahasan

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai Hukum Integritas KPPS Dalam Penghitungan Suara pada Pemilu 2024, yang didasarkan pada data yang dikumpulkan melalui studi wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan-informan yang relevan. Wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 April 2024 dengan ketua dan anggota KPPS TPS 60 di Kantor Kepala Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Deli Serdang, Sumatera Utara, menjadi sumber utama data untuk penelitian ini.

Analisis ini mengutamakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana peneliti menggambarkan, menguraikan, dan menginterpretasikan data yang terkumpul untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan, peneliti memastikan kevalidan dan relevansi data yang diperoleh.

1. Hukum Integritas

Berdasarkan pemahaman keenam narasumber, terdapat kecenderungan pemahaman yang seragam bahwa hukum integritas adalah terkait dengan praktik pemberian uang kepada orang banyak untuk kepentingan tertentu. Namun, perlu dicatat bahwa konsep hukum integritas seharusnya berkaitan

dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral, etika, dan hukum yang berlaku dalam konteks pemilu, bukan hanya terbatas pada tindakan money politic. Oleh karena itu, perlu diperjelas apakah pemahaman narasumber telah mencakup aspek-aspek tersebut.

2. KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)

Terdapat keterlibatan narasumber 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam merincikan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilihan umum di tahun 2024. Analisis lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman dan kesiapan mereka dalam menjalankan tugas tersebut, termasuk dalam memastikan integritas dan kejujuran selama proses penghitungan suara.

3. Pemilu

Pemahaman tentang pemilu sebagai kedaulatan bagi rakyat dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, jujur, dan adil sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari sistem pemilihan umum. Namun, dalam konteks penghitungan suara, penting untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan integritas.

Partisipasi dalam Pelaksanaan Pemilu Sebagai anggota pemerintahan dan kepala dusun, memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam melancarkan dan mensukseskan acara pemilu. Ini termasuk menyediakan fasilitas dan dukungan logistik, serta memastikan kelancaran proses pemungutan suara dan penghitungan hasil. Pendataan Penduduk Salah satu tugas sebagai kepala dusun adalah mendata penduduk di wilayah, termasuk informasi tentang penduduk yang masih tinggal di tempat tersebut dan yang telah meninggal.

Hal ini penting untuk keperluan administrasi dan pengorganisasian pemilu. Tanggung Jawab Anggota KPPS menyadari bahwa suksesnya pemilu sangat bergantung pada kinerja anggota KPPS. Mereka memiliki tugas berat dalam menjalankan proses pemungutan suara dan penghitungan suara dengan tepat dan adil. Kerja Sama dengan KPPS merasa bersyukur karena kerja sama antara pemerintahan dan KPPS berjalan dengan baik. Hal ini sangat bergantung pada arahan dan koordinasi yang diberikan oleh KPPS.

Integritas dan Transparansi menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam proses pemilihan umum. Setiap warga memiliki hak untuk memilih tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak manapun. Kepatuhan pada Aturan yang Berlaku menegaskan bahwa pihak KPPS bekerja sesuai dengan aturan yang ditetapkan, termasuk aturan yang diberlakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) dan saksi-saksi pemilu. Tidak Ada Masalah dalam Proses Pemilu menyatakan bahwa tidak ada masalah yang signifikan dalam proses pemilu, dan semua data dan suara telah tersinkronisasi dengan baik. Kondisi Pribadi Meskipun ada tantangan yang dihadapi dalam proses pemilu, menyatakan bahwa secara pribadi baik-baik saja dan tidak ada masalah yang berarti. Tantangan Teknis dalam Proses Pemilu mengungkapkan bahwa ada tantangan teknis yang dihadapi, seperti keterlambatan dalam proses pengiriman data (sirekap) yang mengakibatkan pekerjaan menjadi lebih berat dan berlangsung hingga larut malam.

KESIMPULAN

Integrasi kpps di Percut Sei Tuan TPS 60, Desa Kolam terlaksana secara transparan, jujur, terbuka dan setiap anggota kpps bertanggung jawab atas tugas yang di berikan sehingga hasil perhitungan suara akurat. Tugas dan tanggung jawab dikerjakan secara teliti dan bekerjasama sehingga jika ada masalah atau kesulitan dapat mudah diatasi. Setiap anggota kpps telah melakukan perannya mulai dari mengumpulkan data, pencoblosan hingga penghitungan suara semaksimal mungkin sehingga tidak ada kendala ketika pemilihan.

Penegakan hukum pada anggota kpps di Percut Sei Tuan TPS 60, Desa Kolam sangat baik dimana jika ada anggota kpps yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi dan hukuman. Adanya saksi dan pengawasan sehingga menjamin tidak adanya kecurangan ataupun kesalahan ketika pemilihan. Setiap anggota kpps telah melakukan kewajibannya semaksimal mungkin dan tidak

melakukan kesalahan sehingga pemilihan umum tahun 2024 terlaksana dengan baik di TPS 60, Desa Kolam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, M. (2020). *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan Dan Catatan Kritis Dari Dalam*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- HARTATI, A. (2021). *INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU (Studi Kasus Integritas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pelaksanaan Pilkada Barito Selatan Tahun 2017)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Hurasan, D. H. (2021). *Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019 di Kota Tebing Tinggi* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Marzuki, S. (2008). *Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(3), 493-412.
- Perdana, A., Tanthowi, P. U., & Sukmajati, M. (Eds.). (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia.
- Rahmatunnisa, M. (2017). *Mengapa Integritas Pemilu Penting*. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 1-11.
- Redjeki, D. P. S., & Heridiansyah, J. (2013). *Memahami sebuah konsep integritas*. *Jurnal STIE Semarang*, 5(3), 1-14.
- Sholahuddin, A. H., Bariah, C., Faried, F. S., Widodo, I. S., Abqa, M. A. R., Disantara, F. P., ... & Suhariyanto, D. (2023). *Hukum Pemilu di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Simanjuntak, N. Y. (2017). *Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu*. *Jurnal Bawaslu*, 3(3), 2443-2539.
- Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*. Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia
- Wibowo, A. P., Wardhana, E. W., & Nurgiansah, T. (2022). *Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3217- 3225.